

KPK TERTARIK DALAMI PAJAK AIR TANAH

Tak Terpengaruh Pandemi, Siap Beri Pendampingan

YOGYA (KR) - Sejumlah pajak daerah dalam dua tahun terakhir mengalami kemerosotan akibat pandemi. Namun demikian terdapat beberapa jenis pajak daerah yang sama sekali tidak terpengaruh. Salah satunya pajak air tanah yang kini menjadi salah satu ketertarikan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah III KPK Edi Suryanto, mengungkapkan pihaknya sudah menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memetakan kesulitan yang dialami oleh daerah. "Kita lebih memfokuskan aspek layanan publik. Terutama pada tahun ini di awal kita sampaikan Covid-19 belum berakhir. Beberapa aspek

di bidang kesehatan, perencanaan penganggaran, perizinan maupun manajemen aset kaitannya dengan layanan publik jadi perhatian kita," urainya di sela koordinasi dan supervisi di kompleks Balaikota Yogya, Selasa (8/2).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa lepas dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini karena sebagian besar pendapatan daerah dari sektor pajak turut terpengaruh. Terutama pajak hotel dan restoran

bagi daerah yang mengandalkan sektor industri pariwisata seperti Kota Yogya. Hal itu pula yang mendorong pemerintah pusat memberikan bantuan bagi pelaku pariwisata yang tertib dan taat pajak.

Namun demikian, terdapat sejumlah pajak daerah yang tercatat tidak terpengaruh pandemi. Realisasinya saat pandemi dan sebelumnya pun relatif sama. Di antaranya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Mineral Bukan Logam serta Pajak Air Permukaan atau Air Bawah Tanah. "Nah di sinilah kita masuk. Kalau provinsi kan pajak air permukaan, tapi kalau kabupaten kota pajak air bawah tanah. Fokusnya pada pajak air bawah tanah. Wujudnya adalah pajak, bukan soal persentasenya besar atau kecil," urai Edi.

Pendampingan yang akan KPK berikan bagi pemerintah daerah, imbuh Edi, menyangkut persoalan yang dihadapi mulai dari pengelolaan, pengawasan dan penerimaan pajaknya. Oleh karena itu, selain berdiskusi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, pihaknya juga melakukan tinjauan ke lapangan. Harapannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pengampu pajak daerah, tidak bekerja sendiri. Melainkan turut melibatkan Sat Pol PP maupun Inspektorat dalam rangka optimalisasi pajak.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi mengaku pihaknya membuka seluas-luasnya bagi KPK untuk melakukan supervisi pajak daerah. Khusus pajak air tanah, diakuinya penerimaan daerah ti-

dak terlalu besar. Realisasinya pun setiap tahun berkisar Rp 2 miliar. Akan tetapi dirinya tidak menampik ada potensi untuk bisa dioptimalkan. "Pajak ini meski tidak besar banget namun ada potensi. Sedang kita petakan wajib pajak yang menggunakan air tanah agar bisa dioptimalkan," tandasnya.

Dari aspek perizinan, sumur air tidak menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada saat ini pun sudah ada kebijakan untuk penghentian izin pembangunan sumur dalam. Sementara penggunaannya mayoritas dari kalangan perhotelan dan industri. Sehingga domain pemerintah kota ialah memberikan kesempatan layanan kepada masyarakat termasuk hotel dan restoran untuk menggunakan air yang diproduksi oleh PDAM Tirtamarta. **(Dhi)-f**

KAPASITAS MAKSIMAL KEMBALI 50 PERSEN

Sektor Perhotelan Berharap Kepedulian Pemerintah

YOGYA (KR) - Sesuai aturan PPKM level 3 yang diterapkan di DIY, maka berbagai pembatasan kembali diberlakukan. Salah satunya perhotelan yang hanya diperbolehkan menyediakan kamar dengan kapasitas maksimal 50 persen. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta pun berharap ada kepedulian dari pemerintah karena dipastikan anggotanya bakal kembali terpukul.

"Restoran juga kembali 50 persen. Kita sebetulnya galau dengan keadaan seperti ini. Tapi kita langsung turuti apa yang diatur pemerintah, tapi kita juga memohon adanya insentif," tandas Ketua PHRI Yogyakarta Deddy Prana-wa Eryono, Rabu (9/2).

Insentif tersebut tidak harus berupa bantuan dana segar guna mendukung operasional industri pariwisata, melainkan bisa berupa keringanan atas kewajiban yang harus ditunaikan. Di antaranya pembebasan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun

pembebasan biaya berbagai perizinan.

Deddy mengaku, banyak kalangan perhotelan yang kini harus memperpanjang izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF) karena telah habis masa berlakunya. Proses pembaruan izin SLF, imbuhnya, cukup memberatkan karena menguras dana yang tidak sedikit. "Bisa Rp 5 juta hingga Rp 50 juta, tergantung dari keluasan hotel dan jumlah kamarnya. Biaya itu memang dari pihak ketiga tapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perizinan," urainya.

Begitu pula dengan kewajiban PBB karena sejak tahun lalu diberlakukan tarif baru yang lebih tinggi. Pada akhir tahun lalu kalangan perhotelan sudah berupaya melunasi berbagai tunggakan. Akan tetapi saat sekarang dalam proses bangkit, namun kembali diberlakukan pembatasan. Tidak sedikit calon konsumen yang melakukan penundaan sewa kamar serta membatalkan kunjungan. Sementara biaya

operasional hotel pun cukup besar. Jika hanya bisa mengoperasikan maksimal 50 persen dari kapasitas, pendapatan yang diperoleh tidak akan mampu mengcover kebutuhan. "Intinya untuk mengakhiri ini memang butuh bersama-sama. Kita sudah mengikuti aturan pemerintah, dan harapannya pemerintah juga bisa mengabulkan keinginan dari PHRI," katanya.

Dikhawatirkan, pemberlakuan PPKM level 3 tanpa diimbangi dengan pemberian insentif bagi industri pariwisata, maka ketimpangan ekonomi berpotensi kembali terjadi. Apalagi pada tahun 2020 lalu sejumlah perhotelan juga memilih tidak beroperasi. Pasalnya selain pembatasan jumlah kamar yang bisa disewakan, okupansi pada hari biasa dan akhir pekan juga merosot tajam. Khusus pada akhir pekan yang biasanya mencapai 90 persen dari total 70 persen kapasitas, kini paling tinggi hanya 40 persen dari kapasitas 50 persen. **(Dhi)-f**

WAGUB DIY TERIMA KUNJUNGAN BALEG DPR RI

Masukan Masyarakat Agar Segera Ditindaklanjuti

YOGYA (KR) - Salah satu tugas Badan Legislatif (Baleg) DPR RI adalah menyusun rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2022 dan mengkoordinasikannya dengan pemerintah serta DPD RI. Hal itu perlu dilakukan untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

"Penyerapan aspirasi masyarakat dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 merupakan hal yang sangat penting. Aspirasi masyarakat yang didengar dan diserap oleh para anggota Baleg DPR RI ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan pengkajian saja. Namun hendaknya dipahami dan diserap dengan baik agar maksud dan interpretasinya tidak salah," kata Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam X saat menerima kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Pemda DIY di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Rabu (9/2).

Kunjungan kerja dipimpin oleh Anggota DPR RI, Esti Wijayati dalam

rangka sosialisasi Prolegnas RUU Tahun 2022.

Wagub DIY mengatakan, berbagai masukan langsung dari masyarakat kiranya dapat ditindaklanjuti dan disusun menjadi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan urgensinya.

Sementara itu Esti Wijayati mengungkapkan, sosialisasi kali ini mencakup Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Berdasarkan keputusan DPR RI, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 40 RUU. Selanjutnya, Baleg juga mempunyai kewajiban mensosialisasikan Prolegnas yang dimaksud kepada masyarakat.

"Maksud dilaksanakannya sosialisasi Prolegnas oleh Baleg adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas kepada masyarakat agar mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan begitu diharapkan dalam pro-

ses pembentukan undang-undang masyarakat dapat memberikan masukan-masukan," paparnya.

Esti menambahkan, setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang tentu dipastikan senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karenanya, kegiatan sosialisasi Prolegnas juga memiliki sasaran yang hendak dicapai. Pertama, terjalinya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah terkait proses pembentukan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

"Adapun sasaran kedua adalah terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan pemerintah daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024," imbuhnya. **(Ria)-f**

669 Peserta PPG UST Mendapat Sertifikat



KR-Istimewa

Pewakilan peserta PPG UST mengikuti prosesi yudisium secara luring.

YOGYA (KR) - Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (FKIP UST) Yogyakarta mengadakan Yudisium Pendidikan Profesi Guru Gelombang I Tahun 2022 di Gedung Pusat UST, Jalan Batikan Umbulharjo Yogyakarta, Selasa (8/2).

Yudisium kali ini diikuti 669 peserta PPG Bidang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika dan Pendidikan Fisika. Mereka mendapatkan

Sertifikat Pendidik (Serdik) sebagai guru profesional. Yudisium diadakan secara daring, hanya perwakilan peserta tiap bidang studi yang hadir di kampus, selebihnya mengikuti via zoom.

Rektor UST Ki Prof Drs Pardimin MPd PhD mengucapkan selamat kepada para peserta PPG yang dinyatakan lulus dan memperoleh serdik. Rektor berpesan, para penerima serdik atau yang telah dinyatakan sebagai guru profesional harus bisa mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan

ke sekolah tempat guru bertugas. "Setelah mendapat serdik, guru pengajarnya harus menjadi lebih baik lagi dan lebih profesional," kata Rektor.

Kaprodi PPG FKIP UST Dr Heri Maria Zulfiati SPd MPd mengatakan, para peserta PPG UST yang dinyatakan lulus dan menerima serdik kali ini terdiri dari PPG Dalam Jabatan (Daljab) Angkatan 1 sejumlah 131 peserta, dari Bidang Studi PBI ada 34 peserta, PGSD 97 peserta dengan tingkat kelulusan 96 persen. "Tingkat kelulusan ini menjadi peringkat 1 nasional. Ini menjadi prestasi membanggakan bagi UST," katanya.

Penerima serdik selanjutnya, yaitu PPG Daljab Angkatan 2, semuanya dari Bidang Studi PGSD dengan tingkat kelulusan 94 persen. PPG Daljab Angkatan 3 ada 102 peserta, semuanya dari Bidang Studi PGSD dengan tingkat kelulusan 98 persen. PPG Daljab Angkatan 4 ada 187 peserta, yang terdiri Bidang Studi PGSD 92 peserta, Pendidikan Matematika 18 peserta, PBI 53 peserta,

dan Pendidikan Fisika ada 24 peserta, dengan tingkat kelulusan 68 persen.

PPG Prajabatan ada 34 peserta, semuanya dari Bidang Studi PGSD dengan tingkat kelulusan 60 persen. Kemudian masih ada 116 peserta dari retaker, baik retaker 2019 maupun 2020. **(Dev)-f**

Doa Sembahyangan di Klenteng Gondomanan



KR-Juvinarto

Petugas membersihkan Altar King Thi Kong untuk persiapan Sembahyangan selanjutnya.

YOGYA (KR) - Seminggu setelah Tahun Baru Imlek 2573, warga Tionghoa menggelar tradisi Sembahyangan King Thi Kong atau Sembahyang untuk Tuhan Allah, Selasa (8/2) di Klenteng Gondomanan. Sembahyangan bersama dengan prokes diikuti terbatas, pada pukul 20.00, 24.00, dan 02.00 WIB dini hari.

"Ini adalah tradisi Sembahyangan yang tertinggi. Khusus untuk tradisi ini dibuatkan altar yang tinggi dengan *ubarampenya* di depan pintu masuk Klenteng," tutur Ketua Pengurus Klenteng Gondomanan Ang Ping Siang usai Sembahyangan pukul 20.00.

Sembahyangan diikuti warga Tionghoa dari berbagai latar belakang agama. "Kita siapkan 9 macam jenis buah seperti pir, apel,

jeruk gulung (jeruk Bali), klengkeng, delima, srikaya, jeruk pulkam, pisang," jelas Ping Siang

Selain buah di altar tersebut juga ada teh, jamuan minum dengan cangkir-cangkir kecil yang setelah selesai doa kemudian dibersihkan dan disiapkan kembali untuk Sembahyangan berikutnya. "Setelah selesai Sembahyangan pagi berikutnya altar King Thi Kong dibongkar," jelasnya.

Berbeda dengan Sembahyangan malam Imlek kepada Dewa-dewa, Bodhisattva, juga Thian (Tuhan YME), maka sembahyangan King Thi Kong ditujukan khusus untuk Tuhan Allah. "Doa mohon keselamatan, perlindungan dan berkat di tahun 2573/2022 di bawah shio Macan Air," pungkasnya. **(Vin)-f**

PROSES PENGHUNIAN AKAN DIHENTIKAN SEMENTARA

Tower II Rusun Bener Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

YOGYA (KR) - Tower II Rumah Susun (Rusun) Bener Tegalrejo diusulkan menjadi tempat isolasi terpadu bagi pasien Covid-19. Kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19.

Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengaku akan segera melakukan komunikasi ke dewan terkait rencana tersebut. Komunikasi juga menyasar masyarakat yang sebelumnya telah mengembalikan berkas pendaftaran. "Proses penghunian kan baru tahap pendaftaran, ya ditunda. Jangan ada penghungan dulu," tandasnya, Rabu (9/2).

Usulan Tower II Rusun Bener menjadi lokasi isolasi terpadu dinilai mempertimbangkan kondisi terkini. Apalagi selama dua hari berturut-turut, temuan kasus baru konfirmasi positif Covid-19 sudah tembus di 100 orang lebih. Padahal minggu sebelumnya tidak lebih dari 50 kasus. Lonjakan kasus baru tersebut dipastikan membutuhkan ruang isolasi yang memadai.

Di samping itu, Tower II Rusun Bener hanya bersebelahan dengan Tower I yang sejak tahun 2020 lalu menjadi tempat isolasi terpadu bagi pasien Covid-19 bergejala ringan atau tidak bergejala. Sehingga jika berada dalam satu kompleks maka akan lebih

memudahkan. "Kalau terkonsentrasi di sana kan akan lebih mudah. Tempatnya juga sangat layak dan bagus," imbuhnya.

Haryadi mengaku, pihaknya belum bisa menargetkan kepastian waktu operasional Tower II Rusun Bener sebagai tempat isolasi terpadu. Hal ini karena harus berkomunikasi ke dewan, Pemkot Yogya juga perlu mengajukan izin ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Sebelum memperoleh lampu hijau dari pihak yang memiliki bangunan, Pemkot tidak bisa serta merta melakukan alih fungsi pemanfaatan.

Total kamar yang terdapat di Tower II Rusun Bener mencapai 44 kamar. Tiap kamar berisi dua ruang tempat tidur. Fasilitasnya pun sudah lengkap mulai dari meja, kursi, almari, kasur dan lainnya. Kondisinya saat ini sangat baru karena bangunannya diselesaikan akhir tahun 2021 lalu. "Shelter yang di sebelahnya itu sekarang mayoritas diisi oleh warga dari luar Kota Yogya. Mereka kena tracing dari pelaku perjalanan, sehingga kita juga perlu antisipasi bagi warga kita. Kalau tempatnya bagus dan layak seperti itu kan masyarakat bisa senang ke shelter dari pada isolasi di hotel yang lebih sulit," papar Haryadi. **(Dhi)-f**

100,2FM DADA SAPI
Dina Diwa Siaran Pagi 06.00 - 10.00

DINA ALIA **DIWA HUTOMO**

www.jogiatfamilyfm.com

YOUR FRIENDS IN THE MORNING

Kani Raras **Mon - Fri**

101,7 FM 06.00 - 10.00 AM

swaramafm.com